

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SUB SEKTOR PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI

Adinda Sartika¹, Rosmeli², Putri Intan Suri³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

¹adindasartika1208@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of each regional tax sub-sector to the Regional Original Income (PAD) of Jambi City during the 2011–2024 period. The research method used is library research with secondary data sourced from the Regional Government Financial Report (LKPD) and the Budget Realization Report (LRA) of the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Jambi City. Data analysis was carried out using effectiveness analysis by comparing tax realization against the set targets, as well as contribution analysis by comparing the realization of each tax to the total PAD realization. The results show that Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) and PPJ have the highest level of effectiveness and contribution among all regional tax sub-sectors. Conversely, Groundwater Tax has the lowest level of effectiveness and contribution. Street Lighting Tax also shows a significant contribution to PAD. Overall, regional taxes play an important role in supporting PAD growth, but optimization efforts in several sub-sectors are still needed to improve the fiscal independence of Jambi City.

Keywords: *effectiveness, contribution, local tax, regional original revenue, Jambi City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi masing-masing sub sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2011–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi pajak terhadap target yang telah ditetapkan, serta analisis kontribusi dengan membandingkan realisasi masing-masing pajak terhadap total realisasi PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPJ memiliki tingkat efektivitas dan kontribusi tertinggi di antara seluruh sub sektor pajak daerah. Sebaliknya, Pajak Air Tanah memiliki tingkat efektivitas dan kontribusi terendah. Pajak Penerangan Jalan juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Secara keseluruhan, pajak daerah berperan penting dalam menopang pertumbuhan PAD, namun upaya optimalisasi pada beberapa sub sektor masih diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Jambi.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah, Kota Jambi.

A. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah memasuki tahapan baru setelah disepakati melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi ini memberikan hak, kewenangan, serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat, mempercepat pencapaian kesejahteraan, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi khusus setiap wilayah (Faisal, 2016).

Setelah otonomi daerah diterapkan, setiap pemerintah daerah dituntut mampu membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri melalui sumber keuangan yang memadai. Di antara berbagai sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat strategis karena mencerminkan

sejauh mana suatu daerah mampu menggali dan mengelola potensi ekonominya. Berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata dan jasa, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD melalui aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah (Rosmeli, 2025). Salah satu komponen utama PAD yang memberikan kontribusi signifikan adalah pajak daerah, yang memiliki karakteristik penerimaan relatif stabil dan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha dan perdagangan, turut berperan dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah, seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan usaha (Suri, 2024). Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD. Penelitian oleh Sari (2018) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD di Kota Medan. Selanjutnya, penelitian Pratama

(2020) menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Bandung tergolong tinggi, terutama pada sektor pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Selain itu, penelitian oleh Wulandari (2021) mengungkapkan bahwa meskipun pajak daerah memiliki kontribusi besar terhadap PAD, masih terdapat kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pemungutan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah masih menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada tingkat daerah.

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi berperan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan perdagangan dengan populasi mencapai 649.656 jiwa pada akhir tahun 2024. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi PAD Kota Jambi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, terdapat kesenjangan antara target anggaran PAD yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, yaitu sebesar Rp 53.283.803.406. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak daerah

yang belum tergali secara optimal. Selain itu, fenomena lain yang terlihat adalah adanya ketidakstabilan kontribusi antar sub sektor pajak daerah, di mana beberapa jenis pajak seperti Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan cenderung memberikan kontribusi besar, sementara pajak lainnya seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir masih relatif rendah dan fluktuatif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah belum merata pada seluruh sub sektor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan daerah, serta kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi masing-masing sub sektor pajak daerah terhadap PAD Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan masing-masing sub sektor pajak daerah di Kota Jambi tahun 2011–2024? Dan Bagaimana kontribusi masing-masing sub sektor

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi tahun 2011–2024?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan masing-masing sub sektor pajak daerah Kota Jambi tahun 2011–2024 dan menganalisis besarnya kontribusi masing-masing sub sektor pajak daerah terhadap PAD Kota Jambi tahun 2011–2024. Sub sektor pajak yang dianalisis meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yakni pendekatan yang melibatkan pengumpulan serta analisis data dari berbagai sumber literatur resmi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa target dan realisasi PAD serta masing-masing sub sektor pajak daerah Kota Jambi periode 2011–2024. Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota

Jambi dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Metode analisis data yang digunakan terdiri dari dua pendekatan:

1. Analisis Efektivitas: Membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak } i}{\text{Target Pajak } i} \times 100$$

Kriteria penilaian efektivitas mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996, di mana nilai >100% dikategorikan Sangat Efektif, 91%-100% Efektif, 81%-90% Cukup Efektif, 61%-80% Kurang Efektif, dan <60% Tidak Efektif.

2. Analisis Kontribusi: membandingkan realisasi penerimaan dari setiap jenis pajak dengan total realisasi PAD, menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak } i}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

Kriteria penilaian kontribusi mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996, kriteria kontribusi mengacu pada standar

yang menetapkan rentang 0-10% sebagai Sangat Kurang, 10%-20% Kurang, 20%-30% Sedang, 30%-40% Cukup Baik, 40%-50% Baik, dan >50% Sangat Baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Pemungutan Sub Sektor Pajak Daerah

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pemungutan masing-masing sub sektor pajak daerah Kota Jambi selama periode 2011–2024, diperoleh gambaran bahwa tingkat efektivitas bervariasi antar jenis pajak dan antar tahun. Secara umum, mayoritas sub sektor pajak daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa sub sektor yang masih perlu dioptimalkan.

Tabel 1 Rata-rata Efektivitas Sub Sektor Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2011–2024 (%)

Sub Sektor Pajak	Rata-rata Efektivitas (%)	Kategori Dominan
Pajak Hotel	95,61	Efektif
Pajak Restoran	100,50	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	92,15	Efektif
Pajak Reklame	86,54	Cukup Efektif
Pajak Parkir	84,89	Cukup Efektif

Pajak Penerangan Jalan	104,31	Sangat Efektif
Pajak Air Tanah	69,42	Kurang Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	70,37	Kurang Efektif
BPHTB	113,07	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

BPHTB merupakan sub sektor pajak dengan tingkat efektivitas tertinggi, dengan rata-rata sebesar 113,07% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingginya efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang sejalan dengan perkembangan sektor properti di Kota Jambi. Selain itu, karakteristik pemungutan BPHTB yang dilakukan pada saat terjadi transaksi memberikan kepastian penerimaan serta memudahkan pengawasan, sehingga potensi kebocoran dapat diminimalkan.

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran juga menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, masing-masing dengan rata-rata sebesar 104,31% dan 100,50%. Tingginya efektivitas Pajak

Penerangan Jalan tidak terlepas dari sistem pemungutan yang terintegrasi dengan pembayaran rekening listrik, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung tinggi dan penerimaan relatif stabil. Sementara itu, efektivitas Pajak Restoran didukung oleh pertumbuhan sektor kuliner serta meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, yang secara langsung memperluas basis pajak dan meningkatkan realisasi penerimaan.

Selanjutnya, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan termasuk dalam kategori efektif dengan rata-rata masing-masing sebesar 95,61% dan 92,15%. Kinerja kedua jenis pajak ini dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Peningkatan kunjungan wisatawan, kegiatan bisnis, serta aktivitas hiburan turut mendorong penerimaan pajak. Namun demikian, sektor ini juga rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi, sehingga realisasi penerimaan tidak selalu mampu melampaui target yang ditetapkan.

Pada kategori cukup efektif, Pajak Reklame dan Pajak Parkir masing-masing memiliki rata-rata efektivitas sebesar 86,54% dan 84,89%. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kendala dalam

pengelolaan dan pengawasan objek pajak, seperti belum optimalnya pendataan reklame serta pengelolaan parkir yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang bervariasi turut memengaruhi capaian realisasi penerimaan pada kedua sektor tersebut.

Adapun Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan tingkat efektivitas terendah, dengan rata-rata masing-masing sebesar 69,42% dan 70,37%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Rendahnya efektivitas Pajak Air Tanah disebabkan oleh keterbatasan jumlah wajib pajak, rendahnya tingkat pelaporan, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah. Sementara itu, rendahnya efektivitas PBB dipengaruhi oleh permasalahan dalam pendataan objek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta masih adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh masyarakat.

Meskipun demikian, secara keseluruhan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Jambi dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi sub sektor

pajak yang berada dalam kategori efektif dan sangat efektif, seperti BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran, yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Dengan demikian, kinerja sub sektor unggulan tersebut dapat mengimbangi kelemahan pada sub sektor yang kurang efektif, meskipun upaya peningkatan dan optimalisasi tetap diperlukan agar seluruh potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Kontribusi Sub Sektor Pajak Daerah terhadap PAD

Hasil analisis kontribusi masing-masing sub sektor pajak daerah terhadap PAD Kota Jambi selama periode 2011–2024 menunjukkan tingkat kontribusi yang bervariasi. BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan merupakan dua sub sektor dengan kontribusi tertinggi dan relatif konsisten terhadap PAD Kota Jambi.

Tabel 2 Rata-rata Kontribusi Sub Sektor Pajak Daerah terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2011–2024(%)

Sub Sektor Pajak	Rata-rata Kontribusi	Kategori Dominan
Pajak Hotel	3,78	Sangat Kurang

Pajak Restoran	9,79	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	2,82	Sangat Kurang
Pajak Reklame	2,99	Sangat Kurang
Pajak Parkir	1,02	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	19,46	Kurang
Pajak Air Tanah	0,07	Sangat Kurang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5,52	Sangat Kurang
BPHTB	16,43	Kurang

Sumber: Data diolah

Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi rata-rata sekitar 19,46% terhadap PAD, menjadikannya salah satu sumber penerimaan penting. Besarnya kontribusi pajak ini didukung oleh mekanisme pemungutan yang bersifat otomatis melalui tagihan listrik PLN, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak relatif tinggi dan penerimaan bersifat stabil.

BPHTB menunjukkan kontribusi rata-rata sekitar 16,43% terhadap PAD, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika transaksi properti. Kontribusi BPHTB tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 20,19%, yang masuk kategori sedang, sedangkan pada tahun-tahun lainnya umumnya berada pada kategori

kurang. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nugrahini & Siagian (2025) yang mengindikasikan bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD cenderung berfluktuasi sekitar 11% hingga 13%, dipengaruhi oleh aktivitas transaksi tanah dan bangunan.

Mayoritas sub sektor pajak lainnya, seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan PBB, memberikan kontribusi yang relatif kecil (di bawah 10%) terhadap total PAD. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pemungutan pada beberapa sub sektor ini tergolong cukup baik. Pajak Air Tanah memiliki kontribusi paling rendah, yakni rata-rata hanya sekitar 0,07% terhadap PAD, yang mencerminkan basis pajak yang sempit dan pengelolaan yang belum optimal. Rendahnya kontribusi tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan air tanah secara komersial, sehingga potensi penerimaan yang dapat digali relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Selain itu, pemanfaatan air tanah umumnya dilakukan oleh skala usaha tertentu,

sehingga tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap efektivitas dan kontribusi sub sektor pajak daerah terhadap PAD Kota Jambi periode 2011–2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPHTB merupakan sub sektor pajak daerah yang menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi di antara seluruh jenis pajak daerah Kota Jambi, dengan realisasi yang bahkan melampaui target pada beberapa tahun. PBB menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup stabil, sementara Pajak Air Tanah memiliki tingkat efektivitas terendah.
2. Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB merupakan sub sektor pajak yang memberikan kontribusi terbesar dan relatif konsisten terhadap PAD Kota Jambi. Sub sektor pajak lainnya memberikan kontribusi yang masih tergolong sangat kurang. Pajak Air Tanah memiliki kontribusi paling rendah terhadap PAD.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah Kota Jambi disarankan untuk:

1. mempertahankan dan meningkatkan kinerja BPHTB dan PBB melalui pembaruan data objek pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak
2. memberikan perhatian khusus terhadap Pajak Air Tanah dengan meningkatkan pendataan wajib pajak, memperketat pengawasan, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut.

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar:

1. Mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak daerah secara lebih mendalam, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, serta sistem administrasi yang digunakan oleh pemerintah daerah.
2. Menggunakan metode analisis yang lebih variatif, seperti analisis regresi atau pendekatan kuantitatif lainnya,

guna mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, N., Dali, R. M., & Syukur, R. D. A. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. 6(April), 1101–1114.
- Asriat & Warda. (2024). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 14(2), 117–138.
- Depdagri. (1996). Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Erlinda & Fauzi. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. 24(01), 1–12.
- Faisal. (2016). Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206–215.

- Iskandar, R. & (2025). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 22(4), 514–525.
- Jambi, B. K. (2025). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi Menurut Pengeluaran 2020–2024. Badan Pusat Statistik Kota Jambi.
- Junisa, D. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. 13(2), 369–378.
- Lkpd. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 150–165.
- Mustaqiem. (2020). Pajak Daerah. *Jurnal Pajak Daerah*, 2(9), 3.
- Nugrahini, A. S., & Siagian, I. S. (2025). Analisis Kontribusi Dan Optimalisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. 11, 28–36.
- Nurfathia, D. (2025). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 271–285.
- Pratama, M. R. S., Rosmeli, & Edy, J. K. (2025). Pengaruh jumlah hotel, tingkat hunian kamar hotel dan jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Provinsi Jambi. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1521–1529.
- Pratama, D. A., & Setyowati, L. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 19(2), 145–156.
- Randy. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 722–729.
- Suri, P. I., Parkhust, H., & Zevaya, F. (2024). Optimalisasi pemasaran menggunakan e-commerce untuk peningkatan penjualan mie Aceh.

Jurnal Abdimas Indonesia, 4(1), 1–
6

Wiwin. (2023). *Keuangan Daerah:
Buku Ajar*. UPN Jatim Repository.